



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27/M-DAG/PER/7/2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 telah ditetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Produsen pupuk;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen pupuk, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor No.04/Permentan/SR.130/02/2006.

Memperhatikan : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

Pasal I

- (1) Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 huruf A, sehingga tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka III Nomor 1 Peraturan ini berlaku mulai tanggal 15 September 2006.

Pasal III

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

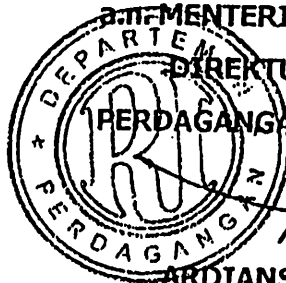
Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 14 Juli 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN DALAM NEGERI ,



ARDIANSYAH PARMAN

DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
A.	PUPUK UREA		
I.	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1. NANGGROE ACEH DARUSALAM	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tenggara 3. Aceh Timur 4. Aceh Tengah 5. Aceh Barat 6. Aceh Besar 7. Pidie 8. Aceh Utara 9. Simeulue 10. Aceh Singkil 11. Bireuen 12. Aceh Barat Daya 13. Gayolues 14. Aceh Jaya 15. Nagan Raya 16. Aceh Tamieng 17. Bener Meriah 18. Kota Banda Aceh 19. Kota Sabang 20. Kota Lhokseumawe 21. Kota Langsa
		2. SUMATERA UTARA	1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Tapanuli Selatan 4. Nias 5. Langkat 6. Karo 7. Deli Serdang 8. Simalungun 9. Asahan 10. Labuhan Batu 11. Dairi 12. Toba Samosir 13. Mandailing Natal 14. Nias Selatan 15. Peksak Barat 16. Humbang Hasundutan 17. Samosir 18. Serdang Bedagei 19. Kota Medan 20. Kota Pematang Siantar 21. Kota Sibolga 22. Kota Tanjung Balai 23. Kota Binjai 24. Kota Tebing Tinggi 25. Kota Padangsidempuan
		3. SUMATERA BARAT	1. Pesisir Selatan 2. Solok 3. Sawah Lunto/Sijunjung 4. Tanah Datar 5. Padang Pariaman

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			6. Agam
			7. Lima Puluh Kota
			8. Pasaman
			9. Kep. Mentawai
			10. Dharmasraya
			11. Solok Selatan
			12. Pasaman Barat
			13. Kota Padang
			14. Kota Solok
			15. Kota Sawahlunto
			16. Kota Padang Panjang
			17. Kota Bukittinggi
			18. Kota Payakumbuh
			19. Kota Pariaman
		4. RIAU	1. Kampar
			2. Indragiri Hulu
			3. Bengkalis
			4. Indragiri Hilir
			5. Palalawan
			6. Rokan Hulu
			7. Rokan Hilir
			8. Siak
			9. Kuantan Singingi
			10. Kota Pekanbaru
			11. Kota Dumai
		5. KEPULAUAN RIAU	1. Kepulauan Riau
			2. Karimun
			3. Natuna
			4. Lingga
			5. Kota Batam
			6. Kota Tanjung Pinang
		6. JAMBI	1. Kerinci
			2. Merangin
			3. Sarolangun
			4. Batang Hari
			5. Muaro Jambi
			6. Tanjung Jabung Barat
			7. Tanjung Jabung Timur
			8. Bungo
			9. Tebo
			10. Kota Jambi
		7. SUMATERA SELATAN	1. Ogan Komering Ulu
			2. Ogan Komering Ilir
			3. Muara Enim
			4. Lahat
			5. Musi Rawas
			6. Musi Banyuasin
			7. Banyuasin
			8. OKU Timur
			9. OKU Selatan
			10. Ogan Ilir
			11. Kota Palembang
			12. Kota Pagar Alam
			13. Kota Lubuk Linggau
			14. Kota Prabumulih
		8. BANGKA BELITUNG	1. Bangka
			2. Belitung
			3. Bangka Selatan
			4. Bangka Tengah
			5. Bangka Barat
			6. Belitung Timur
			7. Kota Pangkal Pinang

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		9.	BENGKULU	1.	Bengkulu Selatan
				2.	Rejang Lebong
				3.	Bengkulu Utara
				4.	Kaur
				5.	Seluma
				6.	Muko-muko
				7.	Lebong
				8.	Kepahiang
				9.	Kota Bengkulu
		10.	LAMPUNG	1.	Lampung Selatan
				2.	Lampung Tengah
				3.	Lampung Utara
				4.	Lampung Barat
				5.	Tulang Bawang
				6.	Tanggamus
				7.	Lampung Timur
				8.	Way Kanen
				9.	Kota Bandar Lampung
				10.	Kota Metro
		11.	BANTEN	1.	Pandeglang
				2.	Lebak
				3.	Tangerang
				4.	Serang
				5.	Kota Tangerang
				6.	Kota Cilegon
		12.	DKI JAKARTA	1.	Adm. Kep. Seribu
				2.	Jakarta Pusat
				3.	Jakarta Utara
				4.	Jakarta Barat
				5.	Jakarta Selatan
				6.	Jakarta Timur
		13.	JAWA BARAT I	1.	Garut
				2.	Tasikmalaya
				3.	Ciamis
				4.	Cirebon
				5.	Kuningan
				6.	Kota Cirebon
				7.	Kota Tasikmalaya
				8.	Kota Banjar
		14.	JAWA TENGAH I	1.	Cilacap
				2.	Banyumas
				3.	Purbalingga
				4.	Banjarnegara
				5.	Kebumen
				6.	Purworejo
				7.	Wonosobo
				8.	Magelang
				9.	Temanggung
				10.	Batang
				11.	Pekalongan
				12.	Pemalang
				13.	Tegal
				14.	Brebes
				15.	Kota Magelang
				16.	Kota Pekalongan
				17.	Kota Tegal
		15.	D. I. JOGJAKARTA	1.	Kulon Progo
				2.	Bantul
				3.	Gunung Kidul
				4.	Sleman
				5.	Kota Jogjakarta

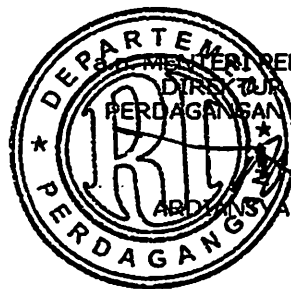
NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA
		16.	KALIMANTAN BARAT	1. Sambas 2. Pontianak 3. Sanggau 4. Ketapang 5. Sintang 6. Kapuas Hulu 7. Bangkayang 8. Landak 9. Melawi 10. Sekadau 11. Kota Pontianak 12. Kota Singkawang
II.	PT. PUPUK KUJANG	1.	JAWA BARAT II	1. Bogor 2. Sukabumi 3. Cianjur 4. Bandung 5. Majalengka 6. Sumedang 7. Indramayu 8. Subang 9. Purwakarta 10. Karawang 11. Bekasi 12. Kota Bogor 13. Kota Sukabumi 14. Kota Bandung 15. Kota Bekasi 16. Kota Depok 17. Kota Cimahi
III.	PT. PUPUK KALTIM	1.	JAWA TENGAH II	1. Boyolali 2. Klaten 3. Sukoharjo 4. Wonogiri 5. Karanganyar 6. Sragen 7. Grobogan 8. Blora 9. Rembang 10. Pati 11. Kudus 12. Jepara 13. Demek 14. Semarang 15. Kendal 16. Kota Surakarta 17. Kota Salatiga 18. Kota Semarang
		2.	JAWA TIMUR II	1. Surabaya 2. Sidoarjo 3. Mojokerto 4. Kota Mojokerto 5. Jombang 6. Nganjuk 7. Kediri 8. Kota Kediri 9. Blitar 10. Kota Blitar 11. Tulung Agung 12. Trenggalek 13. Malang 14. Kota Malang 15. Kota Batu 16. Pasuruan 17. Kota Pasuruan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			18. Probolinggo
			19. Kota Probolinggo
			20. Lumajang
			21. Bondowoso
			22. Situbondo
			23. Jember
			24. Banyuwangi
			25. Pamekasan
			26. Bangkalan
			27. Sampang
			28. Sumenep
		3. KALIMANTAN TENGAH	1. Kotawaringin Barat
			2. Kotawaringin Timur
			3. Kapuas
			4. Barito Selatan
			5. Barito Timur
			6. Barito Utara
			7. Katingan
			8. Seruyan
			9. Sukamara
			10. Lamandau
			11. Gunung Mas
			12. Pulang Pisau
			13. Murung Raya
			14. Kota Palangkaraya
		4. KALIMANTAN SELATAN	1. Tanah Laut
			2. Kota Baru
			3. Banjar
			4. Barito Kuala
			5. Tapin
			6. Hulu Sungai Selatan
			7. Hulu Sungai Tengah
			8. Hulu Sungai Utara
			9. Tabalong
			10. Tanah Bumbu
			11. Balangan
			12. Kota Banjarmasin
			13. Kota Banjarbaru
		5. KALIMANTAN TIMUR	1. Pasir
			2. Kutai Kertanegara
			3. Berau
			4. Bulungan
			5. Nunukan
			6. Malinau
			7. Kutai Barat
			8. Kutai Timur
			9. Penajam Paser Utara
			10. Kota Balikpapan
			11. Kota Samarinda
			12. Kota Tarakan
			13. Kota Bontang
		6. BALI	1. Jembrana
			2. Tabanan
			3. Badung
			4. Gianyar
			5. Klungkung
			6. Bangli
			7. Karangasem
			8. Buleleng
			9. Kota Denpasar

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		7.	NUSA TENGGARA BARAT	1.	Lombok Barat
				2.	Lombok Tengah
				3.	Lombok Timur
				4.	Sumbawa
				5.	Dompu
				6.	Bima
				7.	Sumbawa Barat
				8.	Kota Mataram
				9.	Kota Bima
		8.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Kupang
				2.	Timur Tengah Selatan
				3.	Timur Tengah Utara
				4.	Belu
				5.	Alor
				6.	Flores Timur
				7.	Sikka
				8.	Ende
				9.	Ngada
				10.	Manggarai
				11.	Sumba Timur
				12.	Sumba Barat
				13.	Lembata
				14.	Rotendao
				15.	Manggarai Barat
				16.	Kota Kupang
		9.	SULAWESI UTARA	1.	Batang Monpondo
				2.	Minahasa
				3.	Kep. Sangihe
				4.	Kep. Talaud
				5.	Minahasa Selatan
				6.	Minahasa Utara
				7.	Kota Manado
				8.	Kota Bitung
				9.	Kota Tomohon
		10.	SULAWESI TENGAH	1.	Banggai
				2.	Poso
				3.	Donggala
				4.	Toli-toli
				5.	Buol
				6.	Morowali
				7.	Banggai Kepulauan
				8.	Perigi Moutong
				9.	Tojo Una Una
				10.	Kota Palu
		11.	SULAWESI SELATAN	1.	Selayar
				2.	Bulukumba
				3.	Bantaeng
				4.	Jeneponto
				5.	Takalar
				6.	Gowa
				7.	Sinjai
				8.	Bone
				9.	Maros
				10.	Pangkajene Kepulauan
				11.	Barru
				12.	Soppeng
				13.	Wajo
				14.	Sidenreng Rappang
				15.	Pinrang
				16.	Enrekang
				17.	Luwu
				18.	Tana Toraja
				19.	Polewali Mamasa
				20.	Matene
				21.	Mamuju
				22.	Luwu Utara
				23.	Mamasa

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
			24. Luwu Timur
			25. Mamuju Utara
			26. Kota Makassar
			27. Kota Pare-pare
			28. Kota Palopo
		12. SULAWESI TENGGARA	1. Kolaka
			2. Konawe
			3. Muna
			4. Buton
			5. Konawe Selatan
			6. Bombana
			7. Wakatobi
			8. Kolaka Utara
			9. Kota Kendari
			10. Kota Bau - Bau
		13. GORONTALO	1. Gorontalo
			2. Bualemo
			3. Kota Gorontalo
			4. Bone Bolango
			5. Pohuwato
		14. SULAWESI BARAT	1. Mamuju Utara
			2. Mamuju
			3. Mamasa
			4. Polewali Mamasa
			5. Matane
		15. MALUKU	1. Maluku Tengah
			2. Maluku Tenggara
			3. Maluku Tenggara Barat
			4. Pulau Buru
			5. Seram Bagian Timur
			6. Seram Bagian Barat
			7. Kepulauan Aru
			8. Kota Ambon
		16. MALUKU UTARA	1. Halmahera Barat
			2. Halmahera Tengah
			3. Halmahera Utara
			4. Halmahera Selatan
			5. Kepulauan Sula
			6. Halmahera Timur
			7. Kota Ternate
			8. Kota Kep. Tidore
		17. PAPUA	1. Merauke
			2. Jayawijaya
			3. Jayapura
			4. Nabire
			5. Yapen Waropen
			6. Biak Nunfor
			7. Puncak Jaya
			8. Paniai
			9. Mimika
			10. Sarmi
			11. Keerom
			12. Pegunungan Bintang
			13. Yahukimo
			14. Tolikara
			15. Waropen
			16. Bovendigoel
			17. Mappi
			18. Asmat
			19. Supiori
			20. Kota Jayapura
		18. IRIAN JAYA BARAT	1. Sorong
			2. Manokwari
			3. Fak - Fak
			4. Sorong Selatan
			5. Raja Ampat
			6. Teluk Bintuni
			7. Teluk Wondana
			8. Kaimana
			9. Kota Sorong

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
IV.	PT. PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR I	1. Gresik
			2. Lamongan
			3. Tuban
			4. Bojonegoro
			5. Madiun
			6. Kota Madiun
			7. Magetan
			8. Ngawi
			9. Pacitan
			10. Ponorogo



DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

ABDUL KAH PARMAN